

Bawaslu Pesisir Selatan Luncurkan Bawaslu Membelajarkan, Kupas Tuntas Integritas Penyelenggara Pemilu

Painan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan meluncurkan program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan mengangkat tema Integritas Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Program tersebut dirancang sebagai ruang pembelajaran kelembagaan untuk memperkuat pengetahuan, kompetensi, sekaligus membangun budaya belajar di lingkungan pengawas Pemilu.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan Bawaslu Membelajarkan merupakan bagian dari upaya mengelola pengetahuan kelembagaan (*institutional knowledge*) agar tidak berhenti sebagai pengalaman internal saja, tetapi dapat disebarluaskan dan menjadi bahan pembelajaran bersama.

“Bawaslu Membelajarkan merupakan aset pengetahuan kelembagaan yang perlu disebarluaskan. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan pembelajaran yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan,” ujar Afriki saat dihubungi melalui telepon, Jumat (04/09).

Menurut dia, program tersebut secara khusus diarahkan untuk membentuk ekosistem pembelajaran yang mampu memperkuat kompetensi teknis, manajerial, dan kelembagaan jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di sisi lain, Bawaslu Membelajarkan juga memiliki dimensi eksternal. Program ini, katanya, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kepemiluan masyarakat sekaligus memperluas jejaring partisipasi dengan berbagai unsur, seperti perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media, komunitas, serta kelompok pemilih.

“Pembelajaran tidak hanya ditujukan untuk internal kelembagaan. Kami ingin membangun jejaring pembelajaran dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan sehingga pengetahuan kepemiluan dapat berkembang menjadi pengetahuan bersama,” kata Afriki.

Afriki menjelaskan, pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan menggunakan mekanisme kompetitif yang dikemas dalam beberapa tahapan.

Tahap awal merupakan proses seleksi melalui pemanfaatan media video sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran. Selanjutnya, peserta mengikuti *knowledge showcase* yang dikemas dalam forum pembelajaran komparatif.

Forum tersebut memberikan ruang bagi pemateri untuk menginterpretasikan sekaligus mengelaborasi modul pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kelembagaan yang dimiliki.

Tahap terakhir adalah grand final tingkat nasional yang menjadi ruang penetapan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan kompetensi terbaik dalam program tersebut.

“Setiap tahapan dirancang bukan sekadar sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai proses transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas kelembagaan,” ujar Afriki.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syauqi Fuadi, mengatakan Bawaslu Pesisir Selatan memilih tema integritas penyelenggara Pemilu dengan mengangkat studi kasus Putusan DKPP Nomor 87/DKPP-PKE-IV/2025.

Syauqi yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menjelaskan, putusan tersebut menjadi penting untuk dipelajari karena berkaitan dengan pengalaman empiris penyelenggaraan Pemilu di wilayah setempat.

“Kasus ini menjadi pengalaman empiris di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan penyelenggara Pemilu karena terafiliasi dengan partai politik. Hal tersebut kemudian dibuktikan melalui surat keputusan kepengurusan partai politik,” ujar Syauqi.

Menurut dia, terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat ditarik dari putusan tersebut, terutama berkaitan dengan integritas dan independensi penyelenggara Pemilu.

Putusan DKPP, kata Syauqi, memberikan sejumlah catatan korektif mengenai integritas dan independensi, ketidakcermatan administratif, konflik kepentingan, hingga mekanisme penyelesaian status penghapusan nama dari kepengurusan partai politik.

“Penyelesaian status penghapusan nama dari kepengurusan partai politik harus melalui mekanisme yang jelas. Hal ini berkaitan langsung dengan integritas, independensi, dan kredibilitas kelembagaan penyelenggara Pemilu,” katanya.

Syauqi berharap pembelajaran yang dikemas melalui Bawaslu Membelajarkan dapat menjadi referensi bagi jajaran penyelenggara, pengawas, maupun masyarakat dalam memahami pentingnya menjaga integritas dan independensi penyelenggara Pemilu.

“Semoga permasalahan integritas penyelenggara Pemilu yang kami sajikan secara komprehensif melalui program Bawaslu Membelajarkan ini dapat menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan pemilu mendatang,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Sekretariat Bawaslu setempat, Rinaldi, menambahkan materi pembelajaran tersebut juga dapat diakses masyarakat melalui kanal *YouTube* Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan hipertaut <https://youtu.be/EGUqIDK9Beg?si=Q9vtDYMOzT9hmaYq>.

“Kami harap masyarakat, seluruh pihak dapat memberikan respons berupa *like*, komentar, dan penyebarluasan (*share*) lebih jauh lagi agar apa yang kami buat dapat lebih baik lagi ke depannya,” kata Rinaldi.

Penulis : Naimul Qisman

Editor : Riyan Alghi Fermana

Penyunting Akhir : Wella Putri Sari

Tanggal Pers Rilis : 4 September 2026

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Narahubung:

Riyan Alghi Fermana (082168548629)

Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Jl. H. Ilyas Yacub Nomor 11, Nagari Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, 25651

Surel: set.pesisirselatan@bawaslu.go.id | Situs web: pesisirselatan.bawaslu.go.id